

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali (2017), *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta Catatan ke-Empat.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Tarsito, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, Cet. Ke-1.
- Effendi Perangin-angin, *hukum waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi Perangin-angin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- J. Satrio, *Hukum Waris, Alumni*, Bandung, 2018.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Nurhendro Putranto, *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*, Balai Harta Peninggalan Surabaya, Surabaya, 2020.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, 1996.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2015.

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) ,Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2018.

Tesis:

Mireille Titisari Miarti Prastuti, Peran dan tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

Jurnal:

Indah Sari, S.H., M.H, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Inestato dan Terstamentair Menurut Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadharma, Volume 5, No.1 September 2014

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 60 tahun 2016 tentang Tata cara Pelaporan Wasiat dan  
Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi  
Administratif Terhadap Notaris

Surat edaran yang dikeluarkan Direktur Perdata Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daulat Pandapotan Silitonga  
melalui <http://ahu.go.id/>

